

ABSTRAK

Risiko kecelakaan kerja pada buruh pabrik meningkat seiring perkembangan industri, sementara efektivitas perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kebijakan pelayanan publik BPJS Ketenagakerjaan dan mengetahui implementasinya dalam penanganan kecelakaan kerja pada buruh pabrik di Kota Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan non doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang bersifat (deskriptif analitis). Pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen regulasi terkait. Pengaturan hukum mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Yogyakarta telah komprehensif berdasarkan UU No.13/2003, UU No.24/2011, dan PP No.50/2012; layanan klaim dilaksanakan melalui PLKK dengan 60 rumah sakit mitra dan pengawasan DISNAKERTRANS DIY.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian kepesertaan relatif lebih baik ($\pm 37\%$) dibandingkan provinsi lain, didukung oleh kebijakan daerah dan program inovatif. Namun kendala signifikan meliputi rendahnya sosialisasi, keterbatasan pengawas ketenagakerjaan, ketidakpatuhan sebagian perusahaan, beban iuran bagi pekerja berpenghasilan rendah, serta tingginya pekerja informal yang belum terlindungi. Implementasi pelayanan publik BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta telah berjalan secara relatif baik namun masih memerlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan perluasan cakupan untuk memastikan perlindungan JKK yang merata bagi buruh pabrik.

Kata kunci: BPJS Ketenagakerjaan; Jaminan Kecelakaan Kerja; implementasi pelayanan publik; Buruh Pabrik